

penguatan pembiayaan

by Ery Supriyadi

Submission date: 19-Jul-2020 09:14AM (UTC+0700)

Submission ID: 1359188615

File name: pembiayaan_koperaijurnalCo-value.doc (12.79M)

Word count: 6458

Character count: 45069

Penguatan Pembiayaan Koperasi : Membangun Kesadaran Berkoperasi dan Memperkuat Usaha Anggota

Oleh Ery Supriyadi R.

Abstrak

Kondisi koperasi masih kondisi marjinal dan tertinggal, walau terdapat pula beberapa koperasi yang berprestasi pada tingkat wilayah dan nasional. Pertumbuhan dan perkembangan koperasi sangat berhubungan erat dengan akses pemasaran, akses informasi, dan akses permodalan, kemampuan SDM dalam mengelola koperasi. Salah satu titik kunci tingkat perkembangan koperasi berada pada upaya penguatan pembiayaan koperasi dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan koperasi dalam mendukung kegiatan usaha anggota dan koperasi. Globalisasi menempatkan koperasi diminta untuk mampu bersaing dengan pelaku ekonomi atas mekanisme pasar bebas, sementara itu peluang dan informasi pasar sering asimetris terhadap koperasi, bahkan terdapat beberapa indikasi sejumlah kebijakan menjadi inhibitor bagi koperasi. Isu utama dalam kaitan ini adalah bagaimana proses memperkuat pembiayaan koperasi, kegiatan apa yang dapat memperkuat pembiayaan koperasi, dan dimana lokasi penguatan koperasi.

Tulisan ini mencoba menguraikan kerangka kebijakan pemerintah dapat menumbuhkembangkan koperasi melalui skim pembiayaan koperasi. Pendekatan normatif maupun praktek penguatan dalam pembiayaan koperasi dijadikan bahan kajian dan sebagai proses pembelajaran yang sangat berarti.

Penerapan skim penguatan pembiayaan yang seragam dapat berdampak mempertajam kesenjangan pengembangan koperasi antar lokasi, antar daerah atau antar koperasi, mengingat setiap daerah memiliki kapasitas yang berbeda-beda berkait dengan desentralisasi. Walaupun demikian, penguatan pembiayaan koperasi berdampak positif bagi koperasi, sehingga peran proaktif pemerintah pusat dan daerah masih menjadi indikator kunci dalam penumbuhkembangan koperasi. Penguatan pembiayaan koperasi harus membuat koperasi memiliki kemandirian, sehingga hal ini perlu didukung dengan upaya menggalakkan pemahaman, konsepsi, dan komitmen terhadap koperasi sebagai lembaga sosial ekonomi sekaligus badan usaha terhadap segenap kelompok masyarakat. Fasilitasi atau dukungan pembiayaan koperasi tidak meninabobokan anggota maupun koperasi, atau juga berarti tidak ada praktek fasilitasi yang hanya dinikmati untuk keuntungan pengurus

Keywords: Penguatan, Pembiayaan, kemandirian, Pertumbuhan, Koperasi.

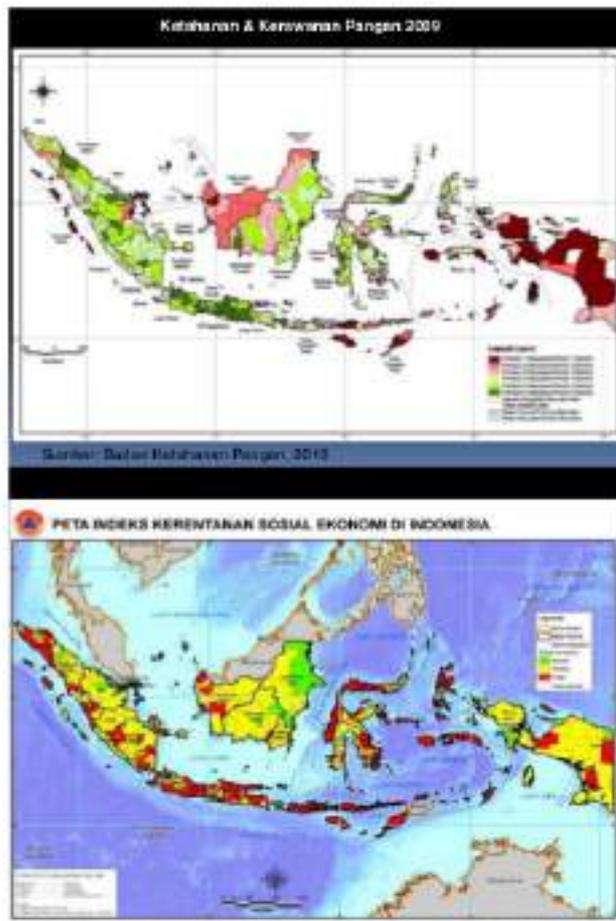
KOPERASI DAN TANTANGANNYA

Tahun 2010 Kementrian Koperasi & UKM dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menyatakan tahun kebangkitan koperasi, meskipun secara aktual, koperasi masih dalam kondisi marjinal dan tertinggal, tetapi juga terdapat beberapa koperasi yang berprestasi pada tingkat wilayah dan nasional.

Pengalaman dan penelitian menunjukkan bahwa kelemahan pertumbuhan dan perkembangan koperasi diantaranya menyangkut akses pemasaran, akses informasi, dan akses permodalan, kemampuan SDM dalam mengelola koperasi. Salah satu titik kuncinya berada pada upaya penguatan pembiayaan koperasi dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan koperasi dalam mendukung kegiatan usaha anggota dan koperasi. Jika koperasi kuat dalam permodalan, diharapkan mampu memperkuat struktur modal dalam mendukung jalannya usaha anggota dan perusahaan koperasi. Pertanyaannya yang muncul adalah bagaimana proses memperkuat pembiayaan koperasi, kegiatan apa yang dapat memperkuat pembiayaan koperasi, dan dimana lokasi penguatan koperasi perlu dilakukan.

Fasilitasi pembiayaan koperasi merupakan salah satu aktivitas pembangunan. Sementara itu, aktivitas pembangunan yang hanya berorientasi kepada pertumbuhan telah berdampak tidak langsung pada terjadinya kesenjangan sosial atau kemiskinan secara tidak disengaja. Padahal apabila masalah kemiskinan terus dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai kegiatan lain, bahkan terjadinya disintegrasi sosial dan kerusakan lingkungan. Hal ini harus diwaspadai dan disikapi secara arif melalui upaya mencari jalan keluar, di antaranya dengan penguatan koperasi.

Aktivitas dan dinamika pembangunan dapat terlihat dari hasil dan dampaknya, di antaranya ditunjukkan oleh indikator tingkat pengangguran, kerentanan sosial ekonomi, perkembangan kawasan, dan ketahanan pangan. Berikut ini disajikan mengenai keempat indikator tersebut sebagai rangkaian fenomena yang menggambarkan kondisi *existing* pembangunan.



Selanjutnya hal yang sama juga terlihat pada peta ketahanan dan kerawanan pangan (tahun 2010) dengan index kerentanan sosial ekonomi (2010). Kedua peta ini menunjukkan bahwa sepanjang pulau Sumatera, Jawa, Bali, Flores, Sumbawa, Sumba, kepulauan Maluku dan Papua memiliki kerentanan sosial ekonomi yang tinggi diikuti dengan kerawanan pangan.

Kedua keadaan di atas menjelaskan secara gamblang bahwa negeri kita, Indonesia dalam keadaan rawan pangan, rentan sosial ekonomi, terjadinya pengangguran, kemiskinan. Dengan kata lain bahwa terjadi kerentanan dan kerawanan pangan di perdesaan dan kemiskinan perkotaan dalam pembangunan di Indonesia saat ini, baik dalam bentuk *the abjective poor*, *the free poor*, *the creative poor*, atau *the unified poor*. Gambaran ini memprihatinkan perkembangan pembangunan, terlebih lagi jika dikaitkan amanah UUD 1945 yang mengisyaratkan upaya pencerdasan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Di era reformasi saat ini, koperasi mulai nampak terkebiri, padahal sebelum UUD 1945 diamandemen, lembaga koperasi mendapatkan pengakuan penuh secara konstitusional. Pertumbuhan ekonomi cenderung diwarnai dengan pola

pikir dan pendekatan intervensi pasar bebas, yang menempatkan koperasi sebagai aktor yang harus mampu bersaing bebas pula. Koperasi diminta untuk bersaing dengan pelaku ekonomi atas mekanisme pasar bebas, sementara itu peluang dan informasi pasar bersifat asimetris terhadap koperasi, bahkan terdapat beberapa indikasi sejumlah kebijakan menjadi inhibitor bagi koperasi. Kecenderungan liberalisasi ekonomi di pedesaan dan pertanian dilakukan lewat pencabutan subsidi, keterbatasan sarana produksi, kurang tersedianya infrastruktur dasar (jalan, air, tenaga listrik, dll), maupun produksi yang minim. Kondisi ini berindikasi adanya proses alienasi terhadap koperasi. Jika dikaitkan dengan keadaan kerentanan sosek, kerawanan pangan, kemiskinan, dan pengangguran, apakah ini merupakan hasil dari proses amandemen tersebut.

Kalau diingat kembali saat krisis ekonomi tahun 1998, KUMKM (Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) memegang peranan penting dalam nilai transaksi, pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Peran KUMKM cukup signifikan menjembatani pemulihan ekonomi menghadapi krisis. Namun demikian, sepertinya habis manis sepah dibuang, ketika kondisi perekonomian mulai normal kembali, sepertinya KUMKM kembali ke dasar kekumuhan dalam kondisi marjinal. Pada saat krisis ekonomi dilakukan pemulihan dan penyehatan perbankan, tetapi KUMKM kurang mendapatkan perhatian serius dibandingkan dengan sektor perbankan. KUMKM nampaknya masih dipandang sebelah mata. Persoalannya adalah apakah pemerintah masih memiliki *commitment and political will* secara konsisten dan kontinu untuk mengembangkan KUMKM? Atau pengembangan koperasi bagi pemerintah hanya merupakan slogan belaka demi capaian tujuan politis semata?. Bagaimana pula mekanisme operasional otonomi daerah dalam mengembangkan koperasi. Paling tidak terdapat beberapa isu kunci dalam penguatan pembiayaan koperasi, yaitu

1. Apa dan bagaimana kerangka kebijakan pemerintah bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi
2. Sejauhmana skim pembiayaan koperasi ditempatkan sebagai strategi pengembangan KUMKM
3. Bagaimana dampak berbagai variasi skim penguatan pembiayaan antar lokasi atau tingkat pemerintahan daerah yang berbeda-beda.
4. Apakah penerapan strategi penguatan pembiayaan koperasi berdampak bagi perubahan ke arah yang lebih baik terhadap pertumbuhan KUMKM
5. Apakah otonomi daerah akan dapat memperbesar atau justru memperlemah kondisi perkembangan KUMKM dan bagaimana pembagian peran pemerintah pusat dan daerah bagi penumbuhkembangan koperasi.

Tulisan ini mencoba deskripsi terhadap kelima isu dengan pendekatan normatif dan berbasis pada pengalaman kebijakan maupun praktek penguatan

KUMKM sebagai suatu proses pembelajaran. Pada akhirnya tulisan ini mencoba memberikan pemikiran dan solusi alternatif dalam upaya memperkuat pembiayaan koperasi.

KEGIATAN KOPERASI : INISIASI DAN DAMPAKNYA

Koperasi bercirikan *dual identity*, yaitu anggota koperasi bertindak sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan. Kegiatan koperasi diawali dari inisiatif dari segenap sumber daya koperasi untuk memenuhi kebutuhannya secara efektif dan efisien. Inisiatif organisasi dan usaha koperasi secara normatif seharusnya direncanakan dengan tepat dan benar. Paling tidak terdapat tiga komponen utama dalam kegiatan koperasi yaitu keusahaan, keanggotaan, dan kepengurusan. Kunci dari tercapainya inisiatif kegiatan koperasi adalah kesadaran untuk berperan dari segenap elemen sumberdaya manusia di koperasi dengan memanfaatkan *scoptimal* segenap sumberdaya internal maupun eksternal bagi kepentingan bersama. Semakin tinggi tingkat kesadaran untuk berperan akan semakin banyak inisiasi kegiatan koperasi dan semakin tinggi kegiatan koperasi yang ditunjang oleh perencanaan usaha koperasi yang komprehensif. Keadaan ini ditunjukkan dengan keterlibatan aktif secara penuh anggota, manajemen, dan pengurus koperasi, rasa kepemilikan anggota terhadap koperasi yang tinggi, pengurus maupun anggota bermotivasi untuk mencapai tujuan bersama secara optimal, dan bersikap empati dalam setiap momentum kegiatan koperasi. Kegiatan koperasi yang berbasis pada kesadaran untuk berperan ini akan menumbuhkembangkan koperasi dan para anggotanya, adanya kolaborasi dalam pengelolaan koperasi secara efisien dan efektif, peningkatan kapasitas internal koperasi, dan terjalinnya jaringan usaha koperasi dalam mengakses pasar. Kegiatan koperasi yang bermanfaat akan berdampak bagi komunitas anggota koperasi, pengelola, pengurus koperasi, dan masyarakat lingkungannya. Kegiatan koperasi yang bermanfaat seperti ini akan memberikan umpan balik terhadap kesadaran berperan yang semakin besar dan meningkat sejalan dengan berkembangnya koperasi.

Kegiatan koperasi yang berbasis pada kesadaran untuk berperan pada akhirnya akan berpengaruh pula terhadap interaksi koperasi itu sendiri secara internal dan eksternal dalam berbagai fungsi manajemen maupun bisnis koperasi. Hal ini berkait dengan kemampuan koperasi melakukan kerjasama, partisipasi dengan berbagai variasinya, adanya saling kepercayaan, dan memunculkan adanya hubungan saling ketergantungan antar pihak yang berkepentingan dalam kegiatan usaha dan organisasi koperasi. Kondisi ini akan memperluas interaksi koperasi guna mengakses berbagai peluang pasar, informasi, teknologi, keuangan. Interaksi secara internal dan eksternal dari kegiatan koperasi pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran anggota untuk berperan atau menarik minat orang untuk menjadi anggota koperasi. Sebaliknya

jika salah satu atau dari keempat komponen interaksi mengalami kemunduran, maka diikuti dengan turunnya kesadaran untuk berperan terhadap koperasi.

PERMASALAHAN DAN SCARCITY KOPERASI

Koperasi dihadapkan kepada keterbatasan struktural dan tantangan kultural. Nilai solidaritas, gotong royong, dan silih asih dalam masyarakat mulai mengalami kegamangan sejalan dengan masuknya modernisasi dan keterbukaan informasi serta globalisasi. Koperasi ditempatkan sebagai lembaga yang sejajar dengan BUMN, BUMS dalam percaturan perekonomian nasional, sementara kemampuan koperasi dalam gerak dan layanannya masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan bagi pemenuhan kebutuhannya, yaitu keterbatasan permodalan, pemasaran, lemahnya kompetensi SDM, dan lemahnya jaringan usaha dan informasi dalam menunjang interaksi bisnis koperasi. Padahal secara konstitusional dan kebijakan (RPJMN dan RPJPN), koperasi tercatat sebagai sektor/badan usaha yang diharapkan mampu memperluas kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Data menunjukkan (Deptan, 2004; Kemenegkop &UKM, 2004) bahwa KUMKM menjadi katup pengaman dalam pertumbuhan ekonomi saat krisis ekonomi terjadi. KUMKM dan sektor pertanian berperan strategis dalam menggerak perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Sektor ini juga memberi andil besar sebagai mesin penggerak pembangunan, peredam gejolak perekonomian, menopang/penyangga perekonomian nasional, dan menjadi sektor yang mampu mengentaskan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, dan menyerap lapangan kerja. Tidaklah dapat dipungkiri bahwa KUMKM dan sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan, walaupun pada saat krisis ekonomi terlampaui kondisi keduanya kembali pada posisi "dilemahkan". Sebenarnya peran KUMKM ini merupakan sektor yang terlalu berharga untuk diabaikan, sehingga penguatan pembiayaan koperasi menjadi kebutuhan bagi pembangunan, bukan menjadi beban pembangunan.

Kinerja KUMKM dan sektor pertanian seringkali digambarkan sebagai sektor inferior atau membebani pembangunan. Walau koperasi memberikan manfaat bagi pembangunan, namun perlakuan dari pasar dan informasi yang asimetris menempatkan sebagian besar koperasi pada posisi inferior dan marginal. Keadaan ini menjelaskan pengakuan yang relatif rendah terhadap keberadaan koperasi. Atau dengan kata lain interaksi koperasi berada dalam kategori rendah, sehingga kepercayaan terhadap koperasi berkurang, keaktifan anggota koperasi menurun, transaksi bisnis koperasi menurun, kontribusi koperasi dalam pembangunan menurun, dan munculnya ketergantungan koperasi terhadap program pemerintah atau dikooptasi oleh sektor lainnya.

PERLUKAH PENGUATAN PEMBIAYAAN KOPERASI ?

Penguatan pembiayaan koperasi dimaksudkan untuk memfasilitasi kekuatan organisasi dan usaha koperasi maupun anggotanya dalam rangka memperkuat akses koperasi terhadap interaksi pasar, teknologi produksi, informasi, dan meningkatkan produktivitas dan kreativitas koperasi. Pertanyaannya adalah perlukah penguatan pembiayaan bagi koperasi, apa bentuknya, apa tujuannya, apa differensiasinya, dan bagaimana mengefektifkan capaiannya.

Sebagaimana diketahui bahwa secara nasional terdapat 133.000 Koperasi, jutaan petani, peternak, nelayan, dan UMKM yang berusaha dan berperan aktif berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Jumlah UMKM, petani sebagai anggota koperasi cukup besar ini membutuhkan modal untuk menjalankan usaha dan roda penggerak ekonomi secara agregat. Mereka membutuhkan modal, akses pasar, akses informasi, dan jaringan pasar. Mereka merupakan aset sekaligus potensi dalam memanfaatkan dan mengolah sumber daya, sehingga mampu berperan sebagai roda penggerak maupun mesin pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat lokal, wilayah, maupun nasional.

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Realitas menunjukkan bahwa KUMKM mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Data BPS (2006) menunjukkan bahwa 98 % tenaga kerja diserap di sektor KUMKM. Hal ini berarti bahwa memperkuat koperasi melalui skim pembiayaan yang optimal akan berdampak bagi kuat dan sehatnya koperasi. Semakin mampunya koperasi menjalankan usaha dan semakin banyak menyerap tenaga kerja, sehingga angka pengangguran aktual dapat ditekan di kawasan perdesaan maupun perkotaan. Koperasi di perkotaan diharapkan mampu menjadi katup pengaman guna mengentaskan kemiskinan kota, dan koperasi perdesaan memperkuat ketahanan pangan disamping menurunkan kondisi kerentanan sosial ekonomi.

Koperasi yang kuat bermakna bahwa usaha anggota koperasi dan keanggotaannya semakin meningkat, sehingga penguatan pembiayaan koperasi berarti adanya promosi usaha bagi petani, peternak, dan nelayan tergolong dalam usaha mikro dan usaha kecil. Kuatnya koperasi berfungsi menjadi wadah pengembangan bagi usaha mikro yang semakin berkembang menjadi usaha kecil, dan selanjutnya menjadi usaha menengah. Tentunya pelayanan koperasi kepada anggota-anggotanya diantaranya melalui pelayanan keuangan bagi peningkatan pendapatan rutin dan layak usaha bagi anggota dan koperasi itu sendiri. Koperasi berkembang secara simultan bersama perkembangan usaha anggotanya pula. Jika koperasi kuat tetapi anggota koperasinya lemah berarti hanya pengurus dan pengelola koperasi yang kuat; jika anggotanya mendapat layanan keuangan tetapi koperasinya hancur berarti anggota mematikan koperasinya; artinya terjadi kooptasi satu pihak dengan pihak lainnya. Penguatan pembiayaan koperasi selayaknya dimaknakan bahwa akses permodalan bagi koperasi memiliki daya dorong usaha menjadi lebih baik dan progresif baik bagi anggota maupun perusahaan koperasi.

Secara nasional, pada tahun 2008 menunjukkan bahwa layanan bank hanya menjangkau kira-kira 8 % (4 juta UMKM) yang tersebar di 10.000 desa, jumlah dana perkuatan usaha yang diberikan baru mencapai 9% dari koperasi yang ada, baru menjangkau koperasi namun belum menjangkau UMKM. Karena jumlah koperasi dan UMKM yang sangat besar menjadi potensi pasar komoditas dan pasar uang. Jika KUMKM tidak diberdayakan terdapat indikasi menyebabkan kemiskinan yang semakin besar dan menjadi beban negara dalam jangka panjang.

Ketersediaan modal adalah keharusan untuk mendukung usaha. Modal keuangan diperlukan sebagai faktor produksi sebagai pelancar, sebagai faktor kritis, dan sebagai alat peningkatan kapasitas pelaku dalam mengadopsi teknologi. Dengan demikian penguatan pembiayaan koperasi ditujukan untuk memfasilitasi peran modal ini bagi perusahaan koperasi dan dukungan usaha anggota. Salah satu peran yang dilakukan adalah memposisikan koperasi sebagai Lembaga Keuangan Mikro.

Peran kredit pada koperasi berkaitan erat dengan upaya untuk memperkuat kelembagaan koperasi dalam akses permodalan. Beberapa manfaat kredit pada koperasi meliputi membantu anggota dan masyarakat untuk mengatasi keterbatasan modal dengan bunga rendah, mengurangi anggota koperasi pada pelepasan uang, memperbaiki struktur dan pola pemasaran produk anggota/usaha koperasi, menjadi alat mekanisme transfer pendapatan untuk mendorong pemerataan, dan sebagai insentif untuk mendorong produksi dan kreasi inovasi.

Pengalaman pembiayaan koperasi dapat dilihat dari skim maupun program pemerintah dalam memfasilitasi perkuatan modal. Pengalaman membicarakan *lesson learned/best practice*, kegagalan dan keberhasilan, kelemahan dan kelebihan, serta keefektifan. Kita dapat mengungkap bagaimana pengalaman tentang Bank Desa, Kredit Usaha Rakyat, modal awal padanan, asuransi dan reasuransi kredit, penjaminan kredit, penjaminan simpanan, dan lumbung desa. Demikian pula praktek P3KUM maupun pemberian bantuan bantuan sosial (Bansos) bagi KUMKM. Secara praktek, koperasi termasuk lembaga yang tahan banting, walau seringkali sisi negatif/kekurangan yang diberitakan. Padahal prestasinya melebihi kelemahannya, misalnya cukup besar dana simpanan dan cadangan akumulatif yang dimiliki koperasi secara nasional dibanding dengan piutang negara yang dimiliki koperasi, misalnya kasus KUT. Efek halo dan stereotipe kegagalan koperasi di masa lalu cenderung dijadikan alasan kelemahan lembaga koperasi, yang seringkali kurang sebanding dengan efek positif keberhasilan yang ada. Disini terjadi pula proses asimetris informasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Sejarah mencatat bahwa KUMKM terbukti tahan banting. Hal ini ditunjukkan oleh keterandalannya dalam pengalaman pasca krisis ekonomi perekonomian yang digerakkan rakyat dalam bentuk koperasi dan UKM mampu bertahan dan tetap

hidup. Keadaan ini tentunya memberikan keyakinan agar terus membantu, mendorong, dan membesarkan gerakan koperasi.

Namun demikian harus disadari pula bahwa lambannya pertumbuhan koperasi ditentukan oleh keaktifan dan interaksi anggota di dalam organisasi dan usaha koperasi. Anggota sebagai pemilik dan pelanggan koperasi. Persoalan yang cukup parah yang dihadapi gerakan koperasi saat ini adalah terdapat sejumlah indikasi bahwa anggota tidak merasa sebagai pemilik, kemampuan manajerial dan *entrepreneurship skill* yang sangat terbatas dalam mengelola koperasi sebagai badan usaha yang profesional. Terlebih lagi gotong royong sebagai nilai sosial yang dulu menjadi nilai dasar koperasi, sekarang ini mulai kehilangan pegangan, sejalan dengan kegiatan koperasi sebagai badan usaha/ekonomi yang cenderung bermotif komersial semata dan hanya mempertimbangkan biaya dan nilai transaksi/keuntungan mendorong koperasi terjebak dalam komersialisasi semu. Kondisi ini dapat terlihat pada beberapa situasi, yaitu koperasi sebagai badan usaha terus berkembang tetapi akar keorganisasiannya rapuh; usaha koperasi semakin berkembang, tetapi anggotanya tercerabut dari kegiatan perkoperasian; usaha koperasi berkembang untuk pengurus tetapi anggotanya terkooptasi; koperasi berkembang sebagai papan nama koperasi semata, tetapi jauh dari prinsip dan nilai koperasi. Jika keadaan ini terus berlanjut dan dianggap lumrah, maka koperasi dalam jangka panjang akan sakit. Sakitnya suatu organisasi koperasi membutuhkan waktu untuk mengatasi atau mengobatinya, karena menyangkut tatanan nilai, pranata sosial, dan atmosfer bisnis dari kelembagaan koperasi secara internal maupun eksternalnya.

KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Pembangunan dan pengembangan koperasi bersifat kompleks, sehingga memerlukan koordinasi dan dukungan sektor-sektor lain. Pendekatan lintas sektoral dan integratif dapat menghindari *overlapping* program, duplikasi kegiatan yang mengakibatkan pemborosan anggaran. Terdapat beberapa upaya pemberdayaan usaha mikro kecil dalam bentuk tiga jenis kredit yaitu kredit umum, kredit khusus (program) dan kredit **penerusan**. Bank Indonesia (BI) juga memiliki program bantuan teknis untuk meningkatkan akses usaha kecil terhadap kredit perbankan, antara lain : Program Pengembangan Usaha Kecil (PPUK), Program Kemitraan Terpadu, dan Proyek Kredit Mikro. Kebijakan lainnya berupa penyisihan 5% dari laba BUMN untuk pengembangan usaha kecil, usaha kecil yang memiliki potensi ekspor, pembentukan Pos Ekonomi Rakyat (PER). Skim pemberdayaan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat informasi bagi UKM.

Kredit Program menyangkut prosedur penyaluran, besaran dan bentuk kredit, bunga kredit, tenggang waktu pengembalian, sasarannya/target, rentang waktu, serta indikator keberhasilan program. Selanjutnya Ashari (2009) menyatakan

bahwa faktor yang harus diperhatikan dalam kredit program adalah tahapan usaha dan pengalaman berusaha, koordinasi untuk menghindari tumpang tindih antar program yang kontradiktif, kejelasan tujuan yang ingin dicapai implementasi program. Beberapa bentuk pembiayaan pembangunan dan skim kredit dijelaskan pada Tabel 1 di bawah ini.

Pembiayaan Pembangunan dan Skim Kredit/Pembiayaan

Pembiayaan	Skim
Bantuan Cuma-cuma	BLT, BLM, Bansos
Bantuan Bergulir	PMUK, LPDB, MAP
Penguatan Modal	DPM LUER, P3KUM
Subsidi bunga	Bimas, KUT, KKP, KKPA
Komersial	SP3, KUR

Disamping skim kredit di atas, juga terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan akses UKM sentra ke dalam sumber modal, pasar, informasi, dan teknologi. Skim-skim antara lain:

1. Skim Modal Awal Padanan (MAP) yang disalurkan kepada KSP/USP Koperasi,
2. Skim layanan pengembangan bisnis melalui BDS,
3. Skim Kredit Usaha Rakyat (KUR),
4. Skim peningkatan akses UMKM terhadap sumber permodalan melalui jaminan Resi Gudang,
5. Skim Surat Utang Koperasi (SUK),
6. Skim MAP pola ventura dan Inkubator,
7. Skim P3KUM pola Syariah dan konvensional,
8. Perkasa syariah dan konvensional,
9. Skim Penjaminan kredit dan Anjak piutang,
10. Skim Prospek Mandiri,
11. Skim Pembiayaan calon TKI dan Tanggung Renteng.

Secara normatif, terdapat beberapa kelebihan dari keberadaan koperasi sebagai LKM, yaitu berupaya dalam pengentasan kemiskinan, bertindak sebagai lembaga pengembangan ekonomi rakyat. Koperasi sebagai LKM tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, koperasi mengakar di masyarakat, dan koperasi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Disamping kelebihanannya, Koperasi sebagai LKM juga dihadapkan pada beberapa permasalahan, di antaranya kemampuan menghimpun dana yang

berasal atau mengandalkan jumlah anggota. Kemampuan menyalurkan dana di koperasi terbatas karena kemampuan SDM dan pengalaman usaha. Koperasi juga dihadapkan kemampuan manajemen operasional yang dalam prakteknya sangat tergantung pada pengurus koperasi. Kemampuan menghasilkan keuntungan dari jasa keuangan mikro juga masih tergantung dari kemampuan pengurus koperasi dan komitmen anggota. Hal ini berhubungan erat dengan kemampuan dari koperasi dalam membangun jaringan dan akses pasar yang masih terbatas, semakin diperparah lagi dengan kemampuan perencanaan dan pelaporan koperasi yang kurang.

Tabel 12. Komparasi Potensi dan Permasalahan yang dihadapi LKM
Sumber : Wahyudin dalam Wijono (2005)

Aspek	BPR dan BRI Unit Desa	Koperasi
Kemampuan Menghimpun Dana	Mengandalkan tingkat suku bunga rata-rata bank umum	Mengandalkan jumlah anggota
Kemampuan Menyalurkan Dana	Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) namun kualitasnya perlu diperhatikan	Terbatas karena kemampuan SDM dan pengalaman usaha
Kemampuan Manajemen Operasional	Tergantung pada beberapa SDM kunci	Tergantung pada pengurus koperasi
Kemampuan Menghasilkan Laba	Relatif lebih baik dibanding bank umum	Tergantung dari kemampuan pengurus koperasi dan komitmen anggota
Kemampuan jaringan dan akses pasar	Fokus pada usaha perdagangan	Masih Terbatas
Kemampuan perencanaan dan pelaporan	Masih beragam, khususnya BPR yang memiliki modal terbatas dan yang beroperasi di luar Jawa dan Bali	Kurang

Lembaga Keuangan Formal cenderung memberikan prioritas untuk masyarakat perkotaan, skala transaksi yang besar, dan memberikan pinjaman non pertanian. Disamping itu, Lembaga Keuangan Formal cenderung rendah/sedikit memberi insentif masyarakat perdesaan, yaitu kesulitan administrasi (menyebarkan secara geografis, lemahnya komunikasi), resiko sistematis (musim, kovarian pendapatan), kurangnya informasi, tidak adanya alat standar pinjaman (laporan keuangan atau asal usul kredit), serta permasalahan pengembalian (berkaitan dengan musim panen, pengembalian modal kerja). Koperasi sebagai LKM memiliki kelemahan dan kelebihan. Salah satu kelemahannya adalah bahwa simpan pinjam pada koperasi relatif memiliki besaran dan jumlah simpanan kecil, besaran dan jumlah pinjaman kecil, jumlah nasabah cukup banyak, dan belum mampu menghimpun dana dan memobilisasi sumberdaya.

Tabel 3. Peta Lembaga Keuangan Mikro Indonesia (Sumber : Arsyad, L., 2008)

Lembaga Keuangan Mikro Formal	Keuangan Mikro Semi Formal	Keuangan Mikro Informal
Bank Komersial :	Koperasi :	Anisan
BRI Unit Desa Bank Dagang	KSP KUD USP	Pemberi Pinjaman Perseorangan (komersial dan non komersial)
Bank Pembangunan	Lemb. Swadaya Masyarakat :	Penjual eceran
Bank Perkreditan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat • Proyek Mikro Kredit 	Pemilik Toko Pelepas Uang
Lem. Kau Non Bank :	Proyek Pemerintah	
BKD Lembaga Dana Kredit Perdesaan : BKK, LPK, LPN, LPD	IDT Prog. Keluarga Sejahtera	

Besley (1994) menyatakan pasar kredit bersifat tidak sempurna karena persoalan kepemilikan informasi antara peminjam dan pemberi pinjaman. Hal ini diikuti dengan efisiensi pareto yang rendah sehingga menyebabkan penawaran kredit tidak pernah memenuhi semua permintaan kredit yang ada. Informasi yang tidak sempurna menyangkut informasi tidak simetris (*asymmetric information*), *moral hazard*, kesalahan pemilihan (*adverse selection*), dan pencatutan kredit (*credit rationing*).

Pasar kredit perdesaan mengandung tiga hal (Hoff & Stiglitz, 1990), yaitu masalah penyaringan (*screening problem*), masalah insentif (*incentive problem*), masalah penegakan (*enforcement problem*). Selanjutnya pendapat ini didukung oleh Besley (1994), yang menyatakan bahwa pasar kredit perdesaan mengandung tiga ciri utama, yaitu kelangkaan agunan, kurang berkembangnya lembaga komplementer, serta terjadinya risiko kovarian dan pasar yang tersegmentasi (kegagalan pelunasan karena perubahan harga produk, fluktuasi harga dan cuaca, serta kegagalan pada sekelompok individu atau pada satu daerah geografis). Perbandingan kinerja LKM koperasi dengan non koperasi dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Komparasi Kelembagaan Keuangan Mikro

Uraian	BRI Unit Desa	BPR	Pegadaian	Koperasi	KKP
Keragaan kredit					
• Jenis	Modal Kerja, konsumsi	Modal Kerja, konsumsi	Pegadaian	SP	Program
• Kelompok sasaran	Umum	Umum	Umum	Umum	Umum
• Nilai Plafon (Rp. 000)	50-50.000	250-50.000	10-5.000	100-30.000	500-700
• Bentuk kredit	Uang tunai	Uang tunai	Uang tunai	Uang tunai	Uang tunai
• Lama pinjaman (bulan)	6-60	3-30	6-60	1-12	6
• Suku bunga (%/tahun)	24	36	30-42	36 dan 60	18
• Jenis agunan	Penyitaaan agunan	Penyitaaan agunan	Pelafangan agunan	Perehanan agunan	Perehanan agunan
Aturan Pengajuan kredit					
• Jenis agunan	S.Tanah dan Bangunan, Surat Berharga	S.Tanah dan Bangunan, Surat Berharga	Barang Bergerak	S.Tanah dan Bangunan, Surat Berharga	S.Tanah dan Bangunan
• Cara pengajuan	Individu	Individu	Individu	Individu	Berkelompok
• Penyaluran	Individu	Individu	Individu	Individu	Berkelompok
Aturan Pengembalian					
• Bentuk Pengembalian	Uang tunai	Uang tunai	Uang tunai	Uang tunai	Uang tunai
• Waktu Pengembalian	Bulanan	Bulanan	15 hari sekali	Harian, mingguan, bulanan	Pasca panen

(Sumber : Supriatna, 2009)

Yaron (1994) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) syarat LKM yang berhasil (1) Suku bunga pinjaman positif cukup tinggi, mampu menutupi biaya keuangan yang tidak bersubsidi untuk mempertahankan nilai riil ekuitas; (2) Mencapai tingkat pengembalian yang tinggi; (3) Menawarkan suku bunga yang cukup tinggi untuk menjamin agar tabungan sukarela meningkat secara signifikan sehingga mampu membiayai portofolio pinjaman; (4) Efisien dalam mekanisme pemberian kredit (biaya transaksi dan biaya administrasi yang rendah), dalam proses penyeleksian, pemrosesan pinjaman, dan mobilisasi melayani tabungan.

Koperasi sebagai lembaga pelayanan masyarakat diharapkan dapat menjadi lembaga yang berkelanjutan. Koperasi dikatakan sebagai LKM yang berkelanjutan (Sustainability LKM), jika memenuhi kriteria di bawah ini, yaitu :

1. Sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang dibantu
2. Menyatu (*embedded*) dan terkait dengan jaringan institusi lokal
3. Terbangunnya konstruksi sosial (*socially constructed*)
4. Tersedianya pengaturan sosial-ekonomi untuk memenuhi tujuan
5. Terbangunnya aksi sosial dan hubungan sosial
6. Pengaturan kelembagaan
7. Budaya dan motivasi diri
8. Nilai-nilai yang mengatur tingkah laku

9. Institusi pendukung
10. Partisipasi

Dari sisi pemerintah, untuk memperkuat keberadaan LKM, terdapat sejumlah strategi nasional keuangan mikro. Strategi ini berupaya melakukan sinergitas unsur-unsur sebagai berikut :

1. Reorientasi pemerintah (intervensi, biaya mahal, jangkauan terbatas)
 - Kerangka hukum yang jelas
 - Penyediaan dana untuk pengembangan kelembagaan, kapasitas usaha, pelatihan para karyawan lembaga keuangan, pembiayaan kembali lembaga keuangan
2. Lingkungan kondusif
 - Pembagian tugas berdasarkan wilayah (pusat, provinsi, kabupaten/kota)
 - Peraturan, pengawasan, dan dukung infratsuktur yang mendukung
3. Peraturan berbasis prinsip kehati-hatian dan pengawasan efektif
 - Perlindungan penabung kecil
 - Stabilitas sektor keuangan
 - Menghimpun simpanan
 - Menyediakan layanan yang dibutuhkan
 - Memperhatikan ambang batas dalam penerapan prinsip kehati-hatian
4. Pengembangan kelembagaan dan kapasitas usaha
 - Pengembangan SDM
 - Pengembangan kapasitas kelembagaan
 - Kerjasama dengan perguruan tinggi
 - Kerjasama dengan lembaga pendamping
 - Kerjasama dengan dunia usaha
 - Kerjasama dengan lembaga internasional
 - Kerjasama antar lembaga keuangan dengan instansi pemerintah
 - Kerjasama guna meningkatkan kemampuan SDM, sistem operasi dan prosedur, teknologi, jaringan usaha, aksesibilitas, jangkauan pelayanan kepada masyarakat
 - Penguatan infrastruktur keuangan yang mandiri

Berkaitan dengan pengembangan koperasi dan LKM, strategi nasional keuangan mikro dilakukan melalui sinergitas unsur-unsur sebagai berikut :

1. Reorientasi pemerintah
 - Pengaturan dan penyaluran dana bergulir dan program pinjaman bersubsidi dilaksanakan melalui lembaga keuangan koperasi.

Siapkan koperasi, Bagaimana tingkat kesiapan koperasi dalam jangka pendek ? Jangka Panjang ?

- Mengalokasikan dana APBN menjadi keperluan pengembangan kapasitas dan kelembagaan, serta penciptaan sistem pengaturan dan pengawasan yang efisien
2. Lingkungan kondusif
 3. Peraturan berbasis prinsip kehati-hatian dan pengawasan efektif
 - Pengaturan dan pengawasan lembaga yang terpisah dari dukungan fungsi keuangan dan teknis dari Kemenekop &UKM
 - Memastikan adanya pendanaan dan karyawan yang memadai dari lembaga pengawas
 - Mengadakan database lengkap mengenai semua koperasi yang menyediakan layanan jasa keuangan
 - Mengembangkan sistem penilaian untuk lembaga keuangan (koperasi) dengan menetapkan kriteria pembubaran/likuidasi lembaga yang tidak sehat
 - Memastikan penegakan peraturan
 4. Aspek Pembinaan :
 - Fasilitasi pengembangan mekanisme penyediaan dana, pembiayaan kembali
 - Mendukung pengembangan mekanisme pembiayaan kembali (*refinancing*) dan manajemen likuiditas
 - Menghubungkan lembaga keuangan
 - Dukungan dan sediaan sebagian dana untuk pengembangan kapasitas usaha dan , pelatihan SDM, implementasi sistem sertifikasi
 - Mendorong terjalinnya hubungan sinergis dengan bank umum (*linkage program*)
 - Fasilitasi pengembangan bersama berbagai jasa pelayanan, yaitu teknologi informasi, standar operasional prosedur, dan pengembangan produk.
 5. Aspek pendukung
 - Lembaga penelitian dan pengembangan
 - Memastikan keefektifan kebijakan dan strategi
 - Monitoring terhadap implementasi
 - Pengukuran dampak yang muncul

PEMBELAJARAN PENGUATAN PEMBIAYAAN KOPERASI : P3KUM

P3KUM adalah salah satu program dan bagian rangkaian kegiatan pemerintah dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan keluarga yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan

Pinjam Koperasi (USP). Program ini bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro melalui perkuatan permodalan, serta memperkuat peran dan posisi KSP/USP termasuk koperasi yang di kelola. Koperasi bertindak sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro, sehingga program ini secara makro diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

Salah satu temuan lapangan (Panggabean, 2008) didapat bahwa kebijakan perijinan untuk minimarket/supermarket berpengaruh terhadap keberhasilan program ini. P3KUM memfasilitasi para pedagang pasar, namun kebijakan ini akan berpengaruh pada omzet dan keuntungan pedagang di pasar tradisional, sehingga berakibat pada terhambatnya pelunasan atas pinjaman atau pembayaran cicilan ke koperasi. Kesuksesan suatu program perlu secara jeli melihat fenomena karitas dan keberlanjutannya, gejala apa yang muncul, bagaimana tindak lanjutnya dan sejauhmana ketergantungan masyarakat yang diakibatkan oleh program P3KUM.

Pembelajaran P3UKM juga menunjukkan gejala dengan munculnya koperasi dadakan, karena mudahnya membuat koperasi. Salah satu yang harus diwaspadai adalah munculnya koperasi yang kerap kali tidak didasari dari/oleh keinginan anggota untuk membentuknya, tapi muncul dari keinginan sekelompok orang yang mengambil kesempatan serta hanya ingin mendapat dana bantuan dalam jumlah besar dengan jasa kecil dari program pemerintah.

Keadaan ini menimbulkan pandangan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan P3KUM dianggap oleh masyarakat sebagai dana bantuan P3KUM dari Pemerintah atau dana dari Kementerian Koperasi dan UKM berstatus sebagai dana hibah, dan tidak perlu dikembalikan kepada Pemerintah. Ini merupakan moral hazard yang tidak mendidik kepada masyarakat dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang hal ini menjadi penyakit masyarakat yang pada akhirnya membunuh diri gerakan dan organisasi koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, setiap skim program pemerintah menyangkut pembiayaan koperasi selayaknya dikaji secara mendalam bukan hanya pencapaian pelaksanaan program, tetapi juga mengukur tingkat kerentanan sosial ekonomi yang mungkin terjadi dan tingkat keberlanjutannya; tidak hanya penyelesaian program, tetapi juga memperhatikan keefektifan dan timbal baliknya; serta tidak hanya menghabiskan dana, tetapi juga memperhitungkan rasio putaran dan komparasi hasil dan biaya dari aktivitasnya.

KONSEP PIA (PRINCIPAL-INTERMEDIARIES-AGENT) DAN KEBERADAAN KOPERASI

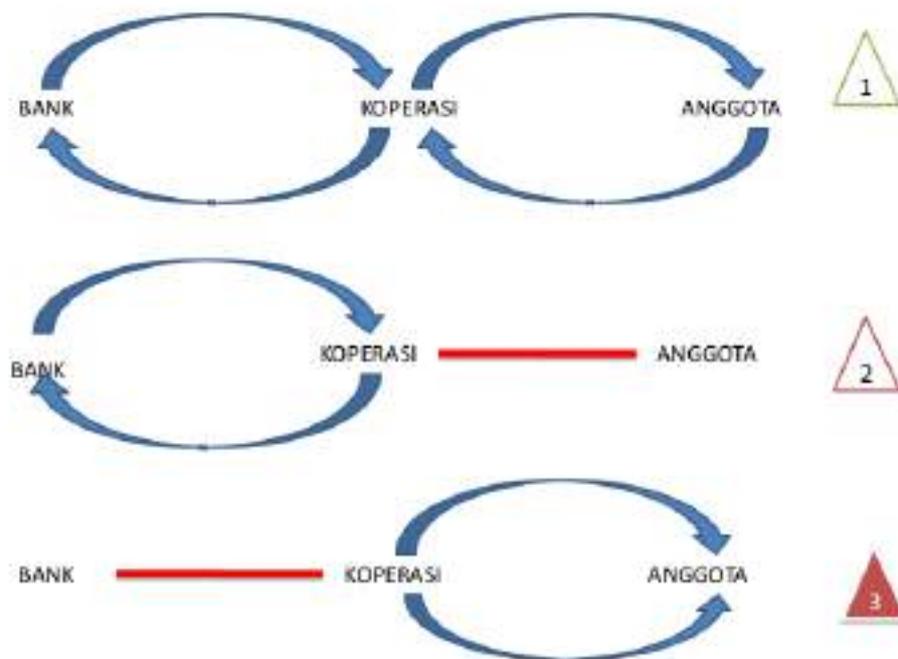
Pelibatan agen dalam sistem pemberian kredit sebagai satu mekanisme teknik pemberian pinjaman berbasis karakter (*character based lending technique*) diikuti dengan pengawasan lokal menunjukkan kinerja yang efisien untuk menghindari kesalahan fatal di dalam menilai kemungkinan pengembalian

pinjaman. Mengacu pada pendapat Van der Meulen, et.al (2005) mengenai proses dan organisasi PIA (*Principal, Intermediaries, Agent*), maka terdapat beberapa konfigurasi yang dapat dilakukan oleh koperasi untuk mengefektifkan fungsi dan perannya bagi dan terhadap anggotanya maupun lembaga keuangan perbankan.

Pada skema 1, Koperasi bertindak sebagai mediator antara anggota dengan bank. Pada skema ini terdapat kerjasama bank dengan koperasi guna memfasilitasi pemanfaatan jasa layanan perbankan bagi anggota koperasi, misalnya gaji, dana pensiun, dana asuransi jiwa, dan simpanan anggota. Anggota memiliki otoritas individu dalam memanfaatkan jasa layanan perbankan dan memperoleh nilai tambah lebih jika berstatus pula sebagai anggota koperasi. Koperasi mendapatkan manfaat dari ikatan kerjasama dengan bank dan manfaat kepercayaan layanan operasional terhadap anggota, sehingga meningkatkan rasa memiliki, motivasi anggota untuk menyimpan uangnya di koperasi, memanfaatkan unit usaha layanan koperasi (waserda, sarana produksi, pembayaran listrik/*ppob*, simpan-pinjaman, perumahan, dll). Skema ini menunjukkan terdapat hubungan simbiosis mutualistik antara bank dengan koperasi dan antara koperasi dengan anggotanya.

Pada skema ke-2 dan ke-3, menunjukkan belum adanya keterpaduan relasi-relasi antara bank dengan koperasi dan koperasi dengan anggotanya. Pada skema ke-2, koperasi melakukan hubungan intim dengan bank dan hanya menempatkan anggota sebagai pihak konsumen. Pada kondisi ini, koperasi juga berposisi sebagai kepanjangan tangan dan kaki tangan pihak perbankan, koperasi menjadi "broker" antara bank dengan anggota, sehingga koperasi cenderung bertindak sebagai koperasi papan nama. Hampir sama dengan skema ke-2, pada skema ke-3 koperasi memiliki hubungan yang kuat dengan anggota tetapi layanan koperasi tidak memiliki akses ke perbankan. Pada kondisi ini koperasi kurang atau tidak mendapat kepercayaan dari perbankan walaupun koperasi berinteraksi kuat dengan anggota.

Gambar 1. Proses dan Organisasi Intermediasi (dimodifikasi dari Van der Meulen, et.al, 2005)



Pada skema ke-2 dan ke-3 ini terjadi masalah *prudential banking* kepada lembaga koperasi dan UMKM, akses koperasi terhadap permodalan terbatas, karena latar belakang agunan, atau jaminan kepemilikan aset, sehingga transaksi koperasi dengan perbankan kecil atau kinerjanya rendah (NPL, LDR, ICOR, dll). Bank dengan prinsip kehati-hatiannya enggan berhubungan dengan anggota koperasi, kecuali koperasinya mampu memberikan keyakinan kepada bank bahwa transaksinya aman atas jaminan aset koperasi (pengurus). Praktek ini mengakibatkan rendahnya rasio pinjaman dan simpanan bank terhadap koperasi, NPL yang tinggi, dan bank yang cenderung bertindak atas dasar *adverse risk*. Dalam jangka panjang, hubungan intermediasi perbankan menjadi tidak harmonis dengan koperasi dan anggotanya, termasuk UMKM, di antaranya menyangkut kegunaan perbankan melayani perkreditan KUMKM atau tidak sehatnya perbankan dalam melakukan fungsi intermediasi bagi pelaku usaha KUMKM di perdesaan karena bank melakukan tindakan ketat terhadap layanan perbaikan (*adverse risk*) terhadap petani/nelayan/umkm serta bank menetapkan aturan di perdesaan berbasis layanan perkotaan terhadap produk maupun SDM koperasi, padahal perdesaan memiliki karakteristik berbeda dengan perkotaan. Meski pihak perbankan dan koperasi tidak dirugikan, namun kedua skema ini dalam jangka panjang berakibat pada semakin menganganya kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan, munculnya praktek kooptasi (*moral hazard*), terjadinya polinormatif kelembagaan ekonomi perdesaan, dan degradasi lingkungan sosial ekonomi dan budaya sebagai korban urban bias dan

penyedotan (*leakages*) sumberdaya dari para pelaku usaha perbankan, koperasi, anggota, dan masyarakat.

Skema ke-2 dan ke-3 perlu diwaspadai oleh segenap pihak/*stakeholder* dalam menetapkan kebijakan/program bagi KUMKM. Meskipun telah diingatkan akan kemungkinan kejadian negatif dan tindak eksploitatif ini, pada kenyataannya terdapat cukup banyak perilaku ini, tentunya hal ini memberikan pembelajaran berarti bahwa rendahnya pemahaman dan kemajuan koperasi berkait dengan proses pembiaran praktek kedua skema ini secara terus menerus tanpa terkendali dari waktu ke waktu.



Gambar 2. Skema 4 PIA

Skema ke-4 merupakan skema hubungan integratif dan hubungan simbiosis mutualistis antara anggota koperasi, UMKM, masyarakat dengan koperasi. Dalam skema ini terdapat *mutual understanding* dan *mutual agreement* dari segenap masyarakat terhadap usaha dan organisasi koperasi, sehingga koperasi menjadi aktor, mesin pertumbuhan, dan roda penggerak perekonomian pada berbagai tingkat wilayah (lokal, nasional, dan global). Koperasi bertindak untuk dan atas nama anggota, UMKM, masyarakat mewujudkan koperasi sebagai kelembagaan dan badan usaha yang mampu memberikan kesejahteraan bagi semua pihak, terutama anggotanya. Pada kondisi ini, keberadaan koperasi dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak secara berkelanjutan, di antaranya meningkatkan omset usaha anggota dan koperasi, menghemat biaya transaksi dan transportasi, menumbuhkembangkan rasa solidaritas, berbagi pengalaman, berbagi informasi-inovasi, membangun kebersamaan, proses pendampingan mengelola keuangan, membantu ekonomi dan kesehatan keluarga, serta memperbaiki infrastruktur lingkungan usaha yang menunjang dan memperlancar proses pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Skema ini juga mengindikasikan bahwa gerakan koperasi perlu memiliki bank koperasi

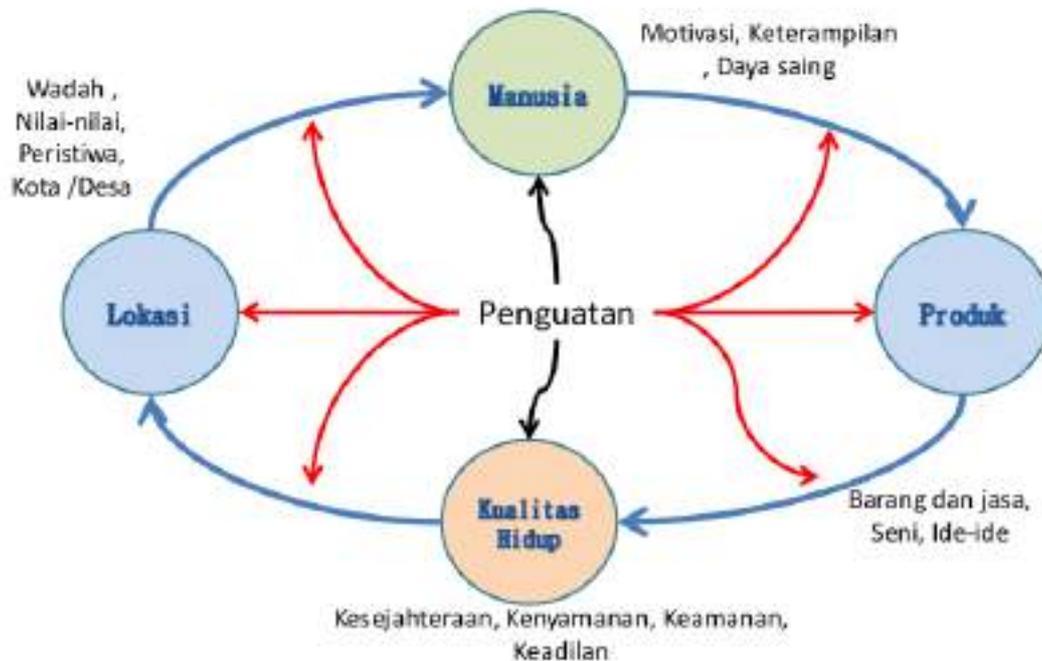
yang kuat dan tangguh yang mampu memberikan layanan optimal bagi anggota koperasi, perusahaan koperasi, maupun masyarakat .

TIPOLOGI PENGUATAN PEMBIAYAAN KOPERASI

Dimensi proses, bentuk kegiatan, dan lokasi perlu dilihat dalam upaya penguatan pembiayaan koperasi, sehingga penguatan pembiayaan menghasilkan koperasi yang kuat modal, kuat usaha, kuat pengelolaan, dan keberadaan koperasi mampu mempromosikan dan bermanfaat bagi usaha anggota dalam jangka pendek maupun panjang. Secara tipologi, penguatan pembiayaan koperasi mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa dimensi, yaitu produk, sumberdaya manusia, lokasi, capaian kualitas hidup. Penguatan pembiayaan koperasi bertujuan untuk meningkatkan motivasi, keterampilan, dan saing SDM koperasi dalam menghasilkan produk (barang maupun jasa), sehingga akses permodalan ini akan mendukung proses produksi, *inbound and outbound logistic*, serta pemasaran dari usaha koperasi maupun anggota-anggotanya.

Penguatan pembiayaan koperasi bertujuan untuk meningkatkan barang dan jasa, seni, ide-gagasan koperasi dalam meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga akses permodalan ini akan mendukung produktivitas, daya kreasi, kenyamanan dan keamanan usaha, aktualisasi dan pemberdayaan lingkungan bagi usaha koperasi maupun anggota-anggotanya. Demikian pula pada dimensi kualitas hidup dan lokasi, dimana terdapat kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, keadilan yang terwujud dalam berkoperasi didukung oleh lokasi sebagai wadah usaha yang mendukung usaha produktif dan kreatif anggota dan koperasi. Tatanan nilai solidaritas, kolektivitas, dan keterbukaan dalam berkoperasi dapat terwujud jika didasarkan atas kesadaran untuk berperan dan berinteraksi aktif bagi kemajuan bersama koperasi serta bermanfaat untuk segenap SDM koperasi (pengurus, pengawas, manajer, karyawan) secara berimbang.

Gambar 3. Penguatan Pembiayaan Koperasi



Penguatan pembiayaan koperasi berdasarkan lokalitas dimaksudkan : (1) Untuk menciptakan lokalitas melalui kegiatan yang bernilai produktif dan bernilai tambah bagi anggota dan perusahaan koperasi, (2) Bersifat intrinsik berdasarkan kearifan lokal, (3) Meningkatkan lokalitas dimana koperasi berada, sehingga mendapat pengakuan secara kegiatan usaha dan wilayah, (4) Setiap kegiatan usaha memiliki resiko (investasi beresiko) bagi anggota, pengelola, perbankan, pemasok barang, pengembang, maupun pemerintah, (5) kegiatan usaha koperasi merupakan milik anggota, citra dan daya anggota, dan citra dan daya kelompok anggota, "coop activity is individual own, individual imagine, and group imagine", (6) kegiatan usaha koperasi memiliki keunikan baik di perdesaan maupun perkotaan. Kondisi ini mensyaratkan perlunya ada keseimbangan penguatan pembiayaan koperasi di kawasan perdesaan, tidak hanya sebatas di perkotaan.

Penguatan pembiayaan koperasi di perdesaan sedapat mungkin menghindari muatan urban bias atau formalitas kredit program. Koperasi melakukan berbagai kegiatan yang terdifferensiasi dalam rangka memuaskan (*satisfy*) bagi anggota , pengelola, masyarakat, dan pemerintah; meningkatkan kapasitas layanan dan kegiatan bernilai surplus; setiap kegiatan koperasi mempertimbangkan biaya atas uang (*Cost of money - marginal cost, marginal*

profit); serta koperasi memberikan nilai layanan yang terbaik bagi anggota sesegera mungkin dan sesuai kebutuhan terkini saat dibutuhkan.

Sebagai lembaga ekonomi lokal, koperasi melakukan kegiatan usaha yang menguntungkan (*profitably*), dan memberikan nilai tambah sosial ekonomi yang menyebar bagi anggota, perusahaan koperasi dan masyarakat. Kegiatan koperasi juga dijalankan dengan biaya murah (*cheaply*), dimana koperasi mampu melakukan kegiatan yang bernilai tambah dengan biaya layanan rendah (*a zero-priced freely*); mampu mengakses barang publik (*accessible public goods*); mampu memberikan kegiatan layanan murah, selektif, menyenangkan, ketepatan interpretasi dan pemahaman mengenai 6 WH (apa, siapa, kapan, mengapa, dimana, syarat dan mekanisme), manajerial profesional mengelola koperasi sebagai perusahaan; memberikan biaya layanan yang sedapat mungkin memberikan nilai manfaat yang jauh lebih besar bagi anggota dan koperasi secara simultan; serta mempertimbangkan kondisi eksternal yang mempengaruhi kinerja koperasi dan menginternalisasi norma secara integratif dalam organisasi dan lembaga koperasi.

Dalam arena kompetisi, penguatan pembiayaan koperasi dilakukan dengan mengakselerasi kegiatan usaha berbasis budaya berkoperasi, kegiatan berbasis sektoral (perdagangan dan retail, pertanian, keuangan, konstruksi, pariwisata/hotel & restoran, pertambangan & energi, dll); jejaring antar tempat dan destinasi lokasi pemasaran; dan pengembangan tingkat layanan koperasi bagi anggota dan diferensiasi produk koperasi yang berorientasi pasar dan berkesinambungan.

HEXAGONAL PENGUATAN PEMBIAYAAN KOPERASI

Penguatan pembiayaan koperasi akan jauh lebih baik jika berlandaskan kepada hexagonal yang saling mengikat satu dengan lainnya. Hexagonal ini meliputi program intensifikasi, ekstensifikasi, penguatan usaha anggota, keuangan dan usaha koperasi, keberlanjutan jaringan, dan kesejahteraan dan kelembagaan ekonomi rakyat. Hal ini bermakna bahwa setiap skim pembiayaan koperasi dapat dipantau dan dievaluasi pada keenam bidang ini, misalnya jika skim kredit program ditujukan untuk intensifikasi pertanian, maka segala komponennya juga harus dapat terukur pada lima bidang penguatan lainnya, sehingga dapat terlihat dengan jelas interrelasi, tingkat efektivitas, kontribusi, dan pengaruh dari skim tersebut pada setiap bidangnya. Jadi setiap skim pembiayaan koperasi dapat terukur tingkat keberhasilan, tingkat capaiannya, dan tingkat keberlanjutan, sehingga dapat terhindar dari terjadinya eksploitasi terhadap KUMKM oleh skim itu sendiri. Dengan keterukuran ini dapat diketahui sejauhmana kecenderungan liberalisasi ekonomi di perdesaan dan perkotaan, tingkat degradasi lingkungan, maupun sejauhmana marginalisasinya terhadap perkoperasian, kawasan perdesaan dan pertanian.



Gambar 4. Hexagonal Penguatan Pembiayaan Koperasi Koperasi

Jika keenam komponen (*hexagonal*) dalam penguatan pembiayaan tidak tercapai secara optimal, maka pada dasarnya terjadi kerentanan dalam perencanaan dan pengembangan koperasi. Perencanaan koperasi yang gagal berarti perencanaan menumbuhkembangkan koperasi melalui penguatan pembiayaan koperasi tidak mempersiapkan kemungkinan perubahan ke masa depan yang integratif dan komprehensif, tidak ada kebijakan yang komprehensif dan integral yang menguatkan skema pembiayaan koperasi; lemahnya kebijakan, antar kota, antar kabupaten, antar sektor, antar pemerintahan, antar lembaga; serta lemahnya koordinasi menjadi dasar untuk menyusun suatu situasi, menjadi dasar untuk menyusun rencana aksi.

PENUTUP

Penguatan pembiayaan koperasi pada dasarnya adalah penguatan usaha anggota, bukan hanya memperkuat usaha pengurus atau perusahaan koperasi. Fasilitasi pembiayaan bagi koperasi guna memperkuat koperasi bukan hanya memperkuat koperasi dalam usahanya, tetapi jauh lebih penting lagi adalah bermanfaat bagi anggota dalam menjalankan usahanya atau memenuhi kebutuhan hidup sosial, ekonomi, dan budayanya.

Penguatan pembiayaan koperasi perlu didukung dengan upaya menggalakkan pemahaman, konsepsi, dan komitmen terhadap koperasi sebagai lembaga sosial ekonomi sekaligus badan usaha terhadap segenap kelompok masyarakat, agar tepat dalam memahami dan menjalankan koperasi. Beberapa pemahaman yang dibelajarkan mencakup : penjiwaan koperasi, individualita, komitmen pengurus,

pengawas, pengelola, solidaritas, manajemen koperasi, serta citra koperasi sebagai badan usaha profesional dan optimalisasi layanan anggota.

Penguatan pembiayaan koperasi juga bermakna bahwa fasilitasi atau dukungan pembiayaan koperasi tidak meninabobokan anggota maupun koperasi, atau juga berarti tidak ada praktek fasilitasi yang hanya dinikmati untuk keuntungan pengurus semata sementara anggotanya merugi, atau anggota tidak membayar sehingga menggerogoti keuangan koperasi yang berakhir dengan matinya koperasi. Tujuan pencapaian penguatan koperasi secara normatif dirumuskan dari, oleh, dan untuk anggota koperasi, sehingga komitmen anggota menjadi sangat penting dan kunci keberhasilan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 2008. Lembaga Keuangan Mikro. Institusi, Kinerja, dan Sustainability. Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Ashari. 2006. *Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*. Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 4 No. 2, Juni 2006 : 146-164.
- _____. 2009. *Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia*. Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 7 No. 1, Maret 2009 : 21-42.
- Bestley, Timothy. 1994. *How Do Market Failures Justify Intervention in Rural Credit Markets*. The World Bank Research Observer, 9(1) : 27-47.
- _____. 1995. *Nonmarket Institution for Credit and Market Sharing in Low-Income Contry*. Journal of Economics Perspektif, 9(1) : 15-27.
- Christen, Robert O. 1998. *Keys to Financial Sustainability*. In Kimenyi, Mwangi S., Robert C. Wieland, & J.D. Von Pischke, editors, *Strategic Issues in Microfinance*. Akdershot, England : Ashgate.
- Ery Supriyadi R. 2002. *Tirai Pembangunan Koperasi (Cooperative Curtain)*. Dua Puluh Pokok-pokok Pikiran Tentang Pembangunan Koperasi. Ikopin. Bandung.
- _____. 2000. *Koperasi Perkebunan Sebagai Alternatif Pembangunan Ekonomi Lokal Dalam Rangka Menghadapi Globalisasi Ekonomi dan Integrasi Pembangunan Berkelanjutan*. LPPM Ikopin, Bandung.
- Gupta, M. Das, H. Grandvoinet, and M. Romani. 2004. *State-Community Synergies in Community-Driven Development*. The Journal of Development Studies, Vol 40., No. 3, February 2004, pp 27-58.
- Herman Soewardi. 1995. *Filsafat Koperasi atau Cooperativism*. UPT Penerbitan Ikopin.
- Ormerod, Paul. 2000. *Butterfly Economics. A New General Theory of Social and Economic Behaviour*. Patheon Books, New York.
- Ferraro, Giovanni. 1996. *Planning as creative Interpretation*. In Mandelbaum, Seymour J. and Mazza, Luigi, and Burchell, Robert W., 1996, *Explorations in Planning Theory*. Center For Urban Policy Research. Rutgers, The State University of New Jersey. New Brunswick, New Jersey.
- Riana Panggabean, 2008. *Dampak Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Bagi*

- Anggota Koperasi. (Studi Kasus di Kabupaten Brebes)*. Infokop Volume 16, September 2008 : 126-142
- Sanyal, Bish. 2002. *Globalization, Ethical, Compromise and Planning Theory. Planning Theory Essay*. Sage Publications (London. Thousand Oaks. CA and New Delhi) Vol. (2) 116-123 2002.
- Supriatna, Ade. 2008. *Aksesibilitas Petani Kecil Pada Sumber Kredit Pertanian di Tingkat Desa : Studi Kasus Petani Padi di Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Sosio Ekonomi Pertanian dan Agribisnis VIII (2) : 134-139.
- _____. 2009. Pola Pelayanan Pembiayaan Sistem Kredit Mikro Usahatani di Tingkat Perdesaan. Jurnal Litbang Pertanian 28 (3).
- Van der Meulen, et.al. 2005. *Organization and Process Intermediation: Theory and Research Problem*. Position Paper for Prime workshop, 6-7 Oktober 2005, Dutch.
- Van der Meulen, B., and A. Rip. 1998. *Mediation in the Dutch science system*. Research Policy, 27, 757-769.
- Wijono, W. (2005). *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional : Upaya Konkrit Memutus Rantai Kemiskinan*. Kajian Ekonomi dan Keuangan (Edisi Khusus). Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional. Departemen Keuangan.
- Yaron, Yakob. 1992. *Successfull Rural Finance Institutions*. World Bank Discussion Papers. Washington D.C.: The World Bank.
- _____. 1994. *What Makes Rural Finance Successful ?* The World Bank Research Observer, 9 (1) : 49-70 .

penguatan pembiayaan

ORIGINALITY REPORT

16%	15%	4%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

7%

★ **es.scribd.com**

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off